

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sangat bergantung pada peran Penting Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS merupakan lembaga yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan perekrutan dan penyaluran TKI ke luar negeri.¹ Tugas PPTKIS meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan, penempatan, dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Melalui proses seleksi yang ketat, PPTKIS bertanggung jawab memilih calon TKI yang memenuhi persyaratan dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja di negara tujuan. PPTKIS juga memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani oleh TKI di luar negeri. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing TKI di pasar kerja internasional.²

Selain itu, PPTKIS memiliki peran penting dalam memastikan penempatan TKI di lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Mereka memberikan informasi kepada TKI tentang kondisi kerja, aspek sosial, dan budaya di negara tujuan agar TKI dapat beradaptasi dengan baik. Selain itu, PPTKIS juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa TKI yang

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia TKI di Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 145.

² Agus Rusmana, *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0* (Bandung: Media Akselerasi, 2019), 256.

ditempatkan di luar negeri mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak upah, hak sosial, dan hak kesehatan. Perlindungan TKI juga menjadi fokus PPTKIS, dengan menyediakan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja untuk TKI selama bekerja di luar negeri. Mereka juga menyediakan pusat layanan yang siap membantu TKI dalam situasi darurat atau ketika membutuhkan perlindungan.³

PPTKIS memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga harus menunjukkan standar layanan yang baik dan profesional agar dapat memenuhi harapan TKI dan pemberi kerja di luar negeri.⁴ Diharapkan bahwa PPTKIS dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui peran pentingnya dalam pengiriman TKI ke luar negeri.

Terjadi kecenderungan bahwa beberapa PPTKIS tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Mereka lebih prihatin dengan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan TKI yang akan dikirim. Salah satu isu yang sering muncul adalah pengiriman TKI secara ilegal. PPTKIS yang tidak bertanggung jawab sering memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan biaya pengiriman yang lebih murah dibandingkan dengan PPTKIS yang sah. Hal ini mengancam keselamatan

³ Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 84.

⁴ Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan: Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan pada Pesantren di Indramayu* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 10.

dan hak-hak TKI serta merugikan reputasi Indonesia sebagai negara pengirim TKI yang bertanggung jawab.⁵ Namun, TKI yang dikirimkan secara ilegal ini seringkali mengalami berbagai macam masalah seperti kerja paksa, penganiayaan, dan bahkan kematian.

Selain itu, isu lainnya adalah terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri. PPTKIS yang tidak bertanggung jawab seringkali tidak memberikan informasi yang cukup terkait dengan kondisi di negara tujuan, hak-hak TKI, dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh. Hal ini membuat TKI menjadi rentan terhadap berbagai macam masalah seperti pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, dan bahkan kekerasan fisik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri untuk mengatasi fenomena dan isu yang terjadi.⁶ Namun, keberadaan PPTKIS yang tidak bertanggung jawab masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga PPTKIS dan sanksi yang lebih tegas terhadap oknum PPTKIS yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan perlindungan TKI di luar negeri dapat ditingkatkan dan fenomena yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dalam publikasi "Statistik Indonesia 2022," jumlah Tenaga Kerja Indonesia

⁵ Budiarmann Bahar, *Cermin: Memetik Pelajaran dari Berbagai Fenomena dan Peristiwa di Negara-Negara Lain* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2020), 230.

⁶ Veronica Putri, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 27.

(TKI) adalah sebanyak 7,09 juta orang pada tahun 2021.⁷ Negara-negara tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia adalah Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong.

Penelitian peran PJTKI dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo memerlukan lokasi yang tepat. Lokasi yang umumnya digunakan dalam penelitian ini adalah di kantor PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo. Para peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana PJTKI mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat di lokasi ini. Selain itu, lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program PJTKI dan memperoleh pandangan yang lebih baik tentang bagaimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian yang tepat menjadi kunci utama dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membantu dalam pengembangan program PJTKI di masa depan.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) memainkan peran penting dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. PPTKIS bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, dan pemberangkatan TKI ke luar negeri. PPTKIS juga harus memberikan pembekalan tentang budaya dan tata cara kerja di negara tujuan agar TKI dapat beradaptasi dengan baik di tempat kerja baru. Selain itu, PPTKIS juga harus memastikan bahwa hubungan kerja antara TKI dan agen di luar negeri

⁷ <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html> (diakses pada 07 Juni 2023).

berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸ PPTKIS harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa TKI bekerja dalam kondisi yang aman dan nyaman di luar negeri. PPTKIS juga harus memastikan bahwa semua proses pengiriman TKI dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Peran Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo. PJTKI bertanggung jawab atas penyaluran tenaga kerja ke perusahaan di dalam dan luar negeri. PJTKI harus memastikan bahwa tenaga kerja yang disalurkan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melakukan penyaluran tenaga kerja.⁹ PJTKI juga harus memberikan pelatihan dan pembekalan kepada tenaga kerja sebelum mereka diberangkatkan ke tempat kerja baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas di tempat kerja baru.

Febriani pada tahun 2013 menulis penelitian yang berjudul "Model Perencanaan Bagi PJTKI dan Lembaga Tempat Pelatihan yang Berkualitas untuk Mewujudkan Ekspor Tenaga Kerja yang Profesional", Ekspor tenaga kerja yang profesional dapat terwujud melalui peran penting dari model perencanaan bagi PJTKI dan lembaga tempat pelatihan yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi model tersebut dapat meningkatkan

⁸ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 288.

⁹ Edriana Noerdin, *Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Women Research Institute, 2005), 41.

kualitas pelatihan untuk tenaga kerja, sehingga mereka menjadi lebih siap dalam menghadapi persyaratan pekerjaan di luar negeri. Selain itu, model perencanaan ini juga membantu PJTKI dalam mengatur pengiriman tenaga kerja secara efektif dan efisien, dengan tujuan meminimalisir risiko yang mungkin muncul.¹⁰

Alasan mendasar yang mendasari pemilihan obyek penelitian ini adalah peran krusial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Meskipun sebagian besar PPTKIS menjalankan tugasnya dengan baik membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terdapat isu serius terkait beberapa PPTKIS yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan pengiriman TKI secara ilegal dan kurangnya perlindungan bagi TKI di luar negeri. Pengawasan yang ketat dan regulasi yang lebih tegas terhadap PPTKIS yang tidak bertanggung jawab menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan TKI dan mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi.

PJTKI juga harus memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat kerja baru. Penyaluran tenaga kerja melalui PJTKI dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo dalam jangka panjang, karena dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat lebih detail mengenai **“Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia**

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam Berkontribusi Untuk Menyediakan Lapangan Kerja?
2. Bagaimana Mekanisme Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjalankan penelitian ini dengan efektif dan efisien, tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam Berkontribusi Untuk Menyediakan Lapangan Kerja.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi ilmiah yang berharga dalam pengembangan pengetahuan mengenai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berwenang, termasuk pemerintah, guna menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi penting bagi kalangan akademis sebagai referensi ilmiah yang mendukung penelitian dan studi lanjutan. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian mengenai peran PPTKIS dapat menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam merumuskan kebijakan yang mengatur aktivitas PPTKIS secara efektif dan terawasi oleh pemerintah.

b. Manfaat bagi masyarakat

Harapan dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat tidak mengalami penipuan atau kerugian akibat kegiatan PPTKIS yang melanggar hukum.

Harapan dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pengetahuan

mereka tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi di PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo.

c. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Melalui penelitian ini, peneliti dapat menggali dan mengembangkan konsep serta memahami proses yang terlibat dalam Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) secara lebih baik.

d. Manfaat bagi peneliti yang akan datang

e. Manfaat bagi peneliti yang akan datang

Harapannya, penelitian ini akan memberikan sumbangan baru pada domain pengetahuan terkait Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang yang serupa atau terkait. Dengan melakukan penelitian yang baik, kita dapat membantu memperluas dan memperdalam pemahaman umum tentang topik ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan. Bab ini akan membahas konsep dasar penelitian secara umum, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, Landasan Teori dan Telaah Pustaka. Bab ini akan mengulas landasan teori dan telaah pustaka yang digunakan sebagai kerangka awal dalam penelitian. Fokusnya akan membahas peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Bab tiga, Metode Penelitian. Pada bab ini, akan dibahas metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan dan analisis data, verifikasi keabsahan data, serta tahapan dan jadwal penelitian.

Bab empat, Hasil Penelitian. Bab ini akan mencakup latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian mengenai peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Bab lima, Kesimpulan dan Saran. Bab terakhir ini akan berfungsi sebagai penutup skripsi, yang akan merangkum inti dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, serta memberikan saran-saran yang relevan.